

## ***Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda***

**Okky Pramudya<sup>1</sup>, Hamzah<sup>1</sup>, Eva Achmad<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi : e-mail: [okyp Pramudya88@gmail.com](mailto:okyp Pramudya88@gmail.com)

### **Abstract**

*Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda dilakukan di Hutan Adat Rio Peniti (KUPS kelas biru), Desa Lubuk Bedorong dan Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) Desa Temenggung. Penelitian ini menggunakan responden 80 orang dengan masing-masing HA 40 responden. Data primer yang dikumpulkan yaitu aspek ekologi dengan metode wawancara menggunakan panduan instrumen kuisioner dan wawancara mendalam serta observasi langsung. Analisis dampak ekologi dilakukan dengan metode Importance Performance Analysis (IPA). Dampak pengelolaan hutan adat terhadap ekologi kedua HA memiliki persepsi positif terhadap indikator ekologi ini terlihat kesesuaian antara nilai kepuasan dengan nilai kepentingan tinggi yaitu 95% untuk HA Rio Peniti dan 96,4% untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti.*

Kata kunci : IPA, Ekologi, Pengelolaan Hutan Adat

### **PENDAHULUAN**

Adanya kebijakan hutan adat di Indonesia menyebabkan jumlah hutan adat terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data dari KemenLHK Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat tahun 2022 hutan adat di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah berjumlah 87 Hutan Adat. Ada total 29 Hutan Adat di Provinsi Jambi, dengan sebaran 7 hutan adat berada di Kabupaten Sarolangun, 12 hutan adat berada di Kabupaten Kerinci, 5 hutan adat berada di Kabupaten Merangin dan 5 hutan adat berada di Kabupaten Muara Bungo. Total luas hutan adat di Provinsi Jambi yaitu 7.984 Ha dengan jumlah KK, 10.837 KK.

Dalam pengelolaan hutan adat, dibentuk unit-unit usaha berupa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sesuai dengan potensi dalam kelompoknya. KUPS ini dibagi menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan keberhasilan dan kemandirian kelompok dalam pengelolaannya, yaitu pertama; biru (*blue*), kedua; Perak (*silver*), ketiga; Emas (*gold*) dan keempat; platina (*platinum*). Kelas biru merupakan kelas tingkat terendah, sedangkan kelas platina merupakan kelas tertinggi yang dinilai telah berhasil dan mandiri. KUPS dengan tingkat platina dianggap sudah memiliki akses modal, pasar, pengolahan produk atau sarana wisata dan kelembagaan yang kuat sehingga KUPS sudah mandiri secara ekonomi (Ekawati, 2020).

© 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

Citation: Okky Pramudya. (2023). *Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967

Tingkat pengelolaan hutan yang berbeda dari hasil berbagai penelitian menunjukkan dampak yang berbeda pula terhadap pengelola perhutanan sosial, hasil penelitian Martapani *et al.*, (2021) tentang evaluasi hutan kemasyarakatan melaporkan bahwa pengelolaan memberikan dampak positif terhadap kondisi tutupan lahan atau ekologi hutan, perbaikan terhadap sosial ekonomi masyarakat dan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut menurut Sari *et al.* (2019) pengelolaan skema HKM dapat melestarikan kawasan hutan dan memberikan kontribusi besar dalam pendapatan anggota kelompok.

Sementara itu penelitian evaluasi pada hutan adat juga sudah dilakukan oleh Muherda (2019) yang melaporkan bahwa pengelolaan hutan adat memberikan dampak positif bagi ekologi dan ekonomi. Selain itu dapat pula memberikan dampak positif bagi kegiatan pertanian, perkebunan dan hasil hutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu hutan adat yang pengelolaannya cukup baik di Provinsi Jambi adalah Hutan Adat Imbo Larangan Pematang kulim Inum Sakti, Desa Temenggung di Kabupaten Sarolangun yang berada pada tingkat KUPS kelas emas. Hutan Adat ini sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah SK Menteri LHK Nomor SK. 774/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018 pada tanggal 19 Februari 2018 dengan luas hutan adat sebesar 115 Ha. Program kegiatan kelompok sudah berjalan cukup baik dengan aktivitas manajemen yang sudah kuat dan jika dilihat dari sisi ekologi, hutan adat ini tergolong masih terjaga tutupan lahannya.

Pada sejumlah hutan adat masih terdapat pengelolaan yang kurang baik, dengan tingkat KUPS kelas biru diantaranya Hutan Adat Rio Peniti, Desa Lubuk Bedorong. Hutan adat ini merupakan hutan adat yang ada pada Kabupaten Sarolangun, memiliki SK dengan Nomor 5776/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 Tanggal 7 September 2018 dengan luas hutan adat sebesar 240 Ha. Pengelolaan hutan masih berjalan kurang optimal, selain itu manajemen pengelolaannya juga kurang kuat, serta pada aspek ekologi terjadi fenomena menarik yakni adanya konflik pada hutan adat terkait aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan adat.

Dalam kurun waktu pemanfaatan kedua hutan adat diatas selama beberapa tahun terakhir, diduga masih ada beberapa masalah terkait pengelolaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait dampak ekologi dari pengelolaan hutan adat. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan hutan adat di Provinsi Jambi agar pengelolaan hutan adat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Februari Tahun 2023 pada dua lokasi, yaitu Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dengan kategori pada KUPS kelas Emas dan Hutan Adat Rio Peniti Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dengan kategori pada KUPS kelas biru.

Pada penelitian ini, Responden pada Hutan Adat Rio Peniti (KUPS kelas biru) merupakan masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Sementara pemilihan responden untuk Hutan Adat Imbo

Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) merupakan masyarakat Dusun Mengkadai Desa Temenggung. Di HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti diambil khusus Dusun Mengkadai karena pengelolaan hutan adat hanya boleh dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat Dusun Mengkadai Desa Temenggung saja. Keduanya merupakan masyarakat yang bersentuhan langsung dan beraktivitas mengelola hutan pada Hutan Adat.

Jumlah populasi penduduk di Desa Lubuk Bedorong yaitu 200 KK yang terdiri dari 777 Jiwa, sedangkan jumlah populasi penduduk di Dusun Mengkadai Desa Temenggung yaitu 200 KK dengan jumlah 567 jiwa. Pengambilan sampel dengan jumlah populasi lebih dari 100 orang menggunakan *margin error* sebesar 10-15% (Arikunto, 2011). Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan *margin error* sebesar 10% dan menentukan jumlah sampel menggunakan formula Slovin (Soewadji, 2012) dengan rumus yaitu:

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel responden yang diambil dalam penelitian

N = jumlah populasi petani anggota kelompok LPHA

E = batas error

1 = bilangan konstan

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan mereka yang ditunjuk sebagai sampel merupakan responden yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2006) purposive sampling adalah teknik untuk mengambil sampel dengan tidak secara random tapi dengan sengaja dan juga dengan pertimbangan berdasarkan pada tujuan dari penelitian. Dengan jumlah responden seperti table dibawah ini :

No	Kelompok	Jumlah Sampel (orang)
1.	Hutan Adat Rio Peniti (KUPS kelas biru)	40
2.	Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas)	40
	Jumlah	80

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan yaitu aspek ekologis. Pada aspek ekologi dikumpulkan data ekologi yang melakukan aktivitas di Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) dan Hutan Adat Rio Peniti (KUPS kelas biru) . Metode pengumpulan data pada aspek ekologi dilakukan dengan wawancara menggunakan instrumen kuisisioner kepada responden dan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada responden menggunakan panduan wawancara.

Analisis dampak ekologi dilakukan dengan dengan metode *Importance Performance Analysis* (IPA). Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor kinerja penting yang diperlukan untuk memenuhi kepuasan responden. Menurut Bahruzin (2014) analisis ini dapat dilakukan pada

dampak ekologis dengan meneliti melalui uji persepsi dengan menggunakan statistik proporsional dalam bentuk proporsi (%) dan disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan sebaran angka dan proporsi, dapat dilakukan perbandingan perubahan tinggi muka tanah kritis dan hidrologi, termasuk debit air dan peningkatan/penurunan mata air di kawasan masyarakat hutan desa pada saat sebelum dan sesudah adanya hutan desa. Metode analisis kuadran, sering dikenal sebagai metodologi ini, pertama kali dipresentasikan oleh Martilla dan James pada tahun 1977 untuk mengevaluasi hubungan antara kualitas udara/prioritas pengembangan layanan.

Penentuan tingkat kepentingan dan kinerja pengelolaan hutan adat dilakukan dengan memberikan menggunakan skala likert, dengan rentang nilai satu sampai dengan empat pada setiap pertanyaan. Rincian kriteria masing-masing nilai untuk tingkat kepuasan dijelaskan dalam Lampiran 2 tentang rincian kriteria nilai tingkat kepuasan dan rincian kriteria nilai tingkat kepentingan. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan tingkat kesenjangan pengelolaan hutan adat adalah sebagai berikut:

$$Xi = \frac{\sum_{i=1}^n X}{n} \quad Yi = \frac{\sum_{i=1}^n Y}{n} \quad Tk = \frac{Xi}{Yi}$$

- Keterangan —
- Tk = Tingkat Kesenjangan
  - X = Nilai Penilaian Kinerja
  - Y = Nilai Penilaian Kepentingan
  - n = Jumlah Responden
  - I = Sub indikator dampak ekologi hutan adat ke-I ( i= 1,2,3..., 5)
  - Xi = Nilai Rata-rata Penilaian Kinerja
  - Yi = Nilai Rata-rata Penilaian Kepentingan

Tahap selanjutnya yaitu menempatkan nilai rata-rata penilaian kepuasan kinerja pengelolaan hutan adat dan nilai rata-rata penilaian tingkat kepentingan dari masing-masing sub indikator dampak ekologis ini ke dalam diagram *cartesius* yang dibagi menjadi empat bagian. Diagram *cartesius* tersebut memuat sumbu diagram yang menunjukkan tingkat kepuasan kinerja dan kepentingan sub indikator tersebut (Meng *et al.*, 2011). Nilai rata-rata dari tingkat kepuasan kinerja dan tingkat kepentingan tersebut menunjukkan koordinat untuk menempatkannya ke dalam diagram *cartesius*. Nilai rata-rata dari seluruh nilai tingkat kinerja dan tingkat kepentingan sub indikator menjadi pembagi sumbu, baik untuk sumbu tingkat kinerja maupun sumbu tingkat kepentingan, dalam diagram *cartesius* tersebut. Gambar 3.3 grafik kartesius untuk memetakan nilai rata-rata kepentingan ( Yi) dan nilai rata kinerja ( Xi) dibagi menjadi empat kuadran seperti gambar 3.3.



Gambar 3.3 Diagram *Cartesius*

Kuadran I (Prioritas Utama). Meskipun barang jasa di sektor ini dianggap signifikan, namun belum memenuhi harapan. Produk layanan tidak memenuhi harapan pada tingkat kinerja yang sama. Untuk menyenangkan masyarakat, barang jasa di kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi. Kuadran II (Pertahankan Prestasi). Kehadiran barang jasa tersebut di kuadran ini menunjukkan signifikansi dan tingkat kinerjanya yang tinggi. Untuk penggunaan selanjutnya, produk layanan ini harus dipertahankan. Kuadran III (Prioritas Rendah). Item layanan kuadran ini terlihat kurang signifikan, dan kinerjanya sebenarnya tidak terlalu luar biasa. Pengaruh terhadap manfaat yang dirasakan cukup kecil, sehingga perubahan barang jasa di kuadran ini dapat dievaluasi kembali. Kuadran keempat (Berlebihan). Kuadran ini terdiri dari barang jasa yang dipandang terlalu banyak dan kurang signifikan. Meningkatkan fungsionalitas layanan di sektor ini hanya dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya (Bahruzin, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

### Penilaian Kepuasan dan Kepentingan Pengelolaan Hutan Adat

Hasil persepsi responden pada masing-masing hutan adat diatas, terkait dampak hutan adat terhadap tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan masyarakat pada aspek ekologi di HA Rio Peniti dan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Responden Terhadap Tingkat Kepuasan dan Tingkat Kepentingan pada Aspek Ekologi

Nomor Indikator Ekologi	TPs (%)	KPs	Ps	SPs	TPt	KPt	Pt	SPt
Dampak Ekologi di HA Rio Peniti								
Indikator 1	0	1	26	13	0	0	18	22
Indikator 2	1	1	23	15	0	0	18	22
Indikator 3	0	3	20	17	0	0	19	21

Indikator 4	0	0	22	18	0	0	21	19
Indikator 5	0	0	20	20	0	0	19	21

Dampak Ekologi di HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti

Indikator 1	1	1	12	26	0	0	9	31
Indikator 2	0	2	12	26	0	0	7	33
Indikator 3	0	1	4	35	0	0	5	35
Indikator 4	0	0	6	34	0	0	7	33
Indikator 5	0	3	5	32	0	0	4	36

Sumber : Analisa Data (2023)

Keterangan :

TPs	= Tidak Puas	TPt	= Tidak Penting
KPs	= Kurang Puas	KPt	= Kurang Penting
Ps	= Puas	Pt	= Penting
SPs	= Sangat Puas	SPt	= Sangat Penting

Dari hasil penilaian tingkat kepuasan kinerja hutan adat terhadap dampak pengelolaan ekologi pada HA Rio Peniti didapatkan nilai dengan kategori puas, yakni sebanyak 26, 23, 20 dan 22 orang responden, sedangkan tingkat kepuasan untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti didapatkan penilaian lebih baik, yaitu berada pada kategori sangat puas dengan jumlah responden 26, 26, 35, 34 dan 32 orang. Hal ini menginterpretasikan bahwa pengelolaan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti menurut responden yang merupakan anggota Kelompok Pengelola Hutan Adat itu sendiri, telah memberikan dampak yang sangat memuaskan, artinya pengelolaan hutan adat dari aspek ekologi pada HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti sudah berjalan lebih baik dibandingkan dengan HA Rio Peniti.

Sementara pada penilaian tingkat kepentingan dampak pengelolaan hutan adat di bidang ekologi, baik responden HA Rio Peniti dan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti, mayoritas menjawab bahwa dampak pengelolaan hutan adat dibidang ekologi sangat penting. Adapun pada HA Rio Peniti dari jumlah total responden 40 orang, yang memberikan nilai penting sebanyak 22, 22, 21 dan 21 orang, sedangkan pada indikator 4 (kondisi tegakan hutan) mendapat nilai penting, dipilih oleh 21 orang responden. Sementara penilaian tingkat kepentingan dampak pengelolaan hutan adat di bidang ekologi untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti, mayoritas responden menjawab sangat penting, yakni berjumlah 31, 33, 35, 33 dan 36 orang dari total 40 responden. Hal ini menjelaskan bahwa dampak pengelolaan hutan adat di bidang ekologi

© 2023 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

Citation: Oky Pramudya. (2023). *Kaji Banding Dampak Ekologi Pengelolaan Hutan Adat Dengan Tingkat Pengelolaan Berbeda*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 6(1); 1-11 doi : 10.22437/jpb.v6i1.27967

sangat dibutuhkan oleh anggota kelompok pengelola hutan adat. Hal ini senada dengan laporan Bahruzin (2014) berdasarkan persepsi masyarakat, program PHBM memberikan dampak positif terhadap kondisi ekologi seperti tutupan lahan, kondisi hidrologi dan peningkatan jumlah pohon.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pada indikator bidang ekologis untuk kedua hutan adat dapat dijabarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Perhitungan Kesesuaian Antara Kepuasan dan Kepentingan pada Indikator Aspek Ekologis

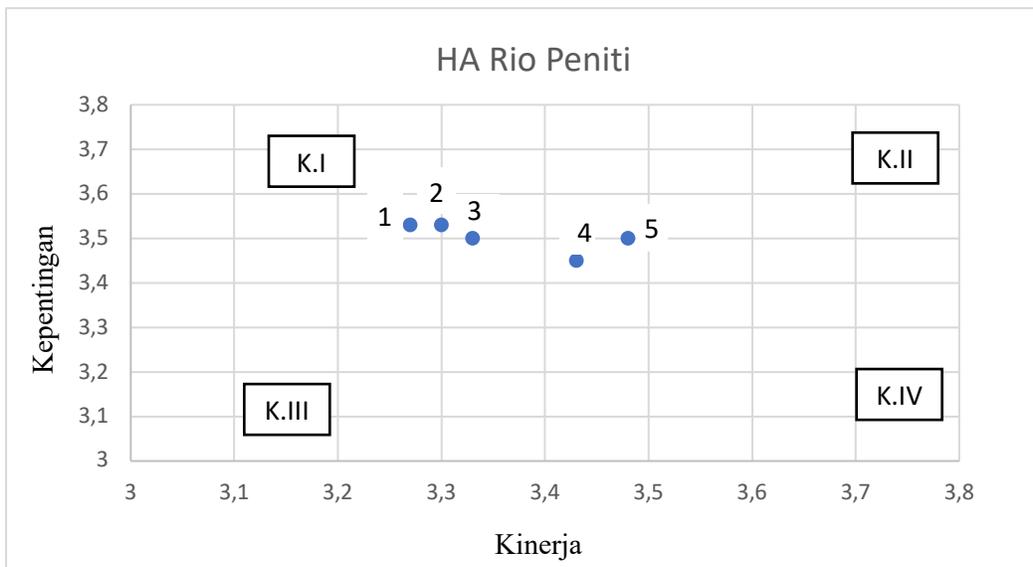
Nomor Indikator (a)	Total Nilai Kepuasan (X) (b)	Total Nilai Kepentingan (Y) (c)	X (d= b/40)	Y (e = c/40)	Tingkat Kesesuaian (%) (f=d/e)
<b>Dampak Pengelolaan Hutan Adat Rio Peniti Aspek Ekologi</b>					
Indikator 1	131	141	3,27	3,53	92 %
Indikator 2	131	141	3,3	3,53	90 %
Indikator 3	133	140	3,33	3,5	95 %
Indikator 4	137	138	3,43	3,45	99 %
Indikator 5	139	140	3,49	3,5	99%
Nilai Rata-rata			3,36	3,502	
Total Rata-Rata Kesesuaian					95 %
<b>Dampak Pengelolaan Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti</b>					
Indikator 1	143	151	3,57	3,78	95 %
Indikator 2	144	153	3,6	3,83	90 %
Indikator 3	154	155	3,85	3,88	100 %
Indikator 4	154	153	3,85	3,83	101 %
Indikator 5	149	156	3,73	3,9	96 %
Nilai Rata-rata			3,72	3,844	
Total Rata-rata Kesesuaian					96,4 %

Sumber : Analisa Data (2023)

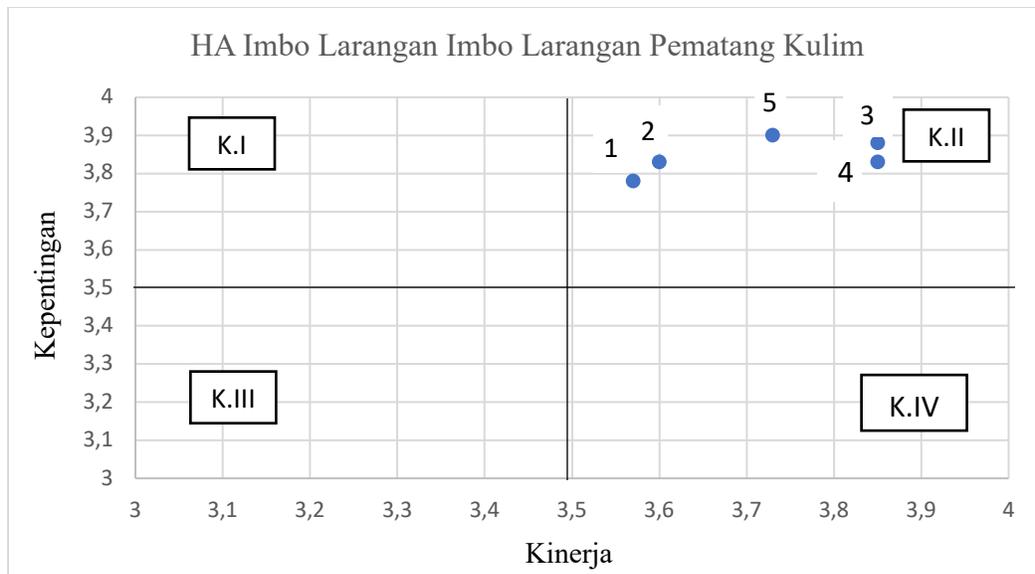
Dari hasil tingkat kesesuaian antara nilai kepuasan dengan nilai kepentingan diketahui bahwa nilai terendah presentasi tingkat kesesuaian yaitu sub indikator 2 yakni keadaan air di sekitar kawasan hutan sebesar 90% untuk kedua hutan adat. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan air sudah baik namun perlu dilakukan perbaikan. Menurut Iodhita (2014), bila nilai presentasi kesesuaian 80-100%, ini menunjukkan sudah memenuhi harapan responden namun masih perlu dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk nilai tertinggi presentasi kesesuaian yaitu sub indikator 4 yakni kondisi tegakan hutan di kawasan hutan dengan nilai 99% untuk HA Rio Peniti dan 102% untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti. Menurut penelitian Purnomo (2015) nilai >100% menunjukkan kinerja sub indikator telah melebihi harapan atau sangat memuaskan bagi responden.

### Analisis Diagram *Cartesius* Terhadap Indikator Ekologis

Hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.9 mengenai tingkat kesesuaian antara kepuasan dan kepentingan dampak pengelolaan hutan adat terhadap aspek ekologi, dimasukkan kedalam diagram *cartesius*, dengan mengelompokkan indikator ke dalam kuadran-kuadran tertentu. Hal ini bermaksud untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan efektifitas masing-masing indikator. Hasil analisis menggunakan diagram *cartesius* terhadap indikator dampak pengelolaan hutan adat pada aspek ekologi pada HA Rio Peniti dan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.



Gambar 1. Diagram *Cartesius* Dampak Pengelolaan Hutan di HA Rio Peniti



Keterangan:

- 1 = Keadaan Udara sekitar Kawasan Hutan
- 2 = Keadaan Air Sekitar Kawasan Hutan
- 3 = Keanekaragaman Hayati dan Keragaman Satwa di Kawasan Hutan
- 4 = Kondisi tegakan hutan di kawasan hutan adat
- 5 = Resiko Banjir dan Longsor di Kawasan Hutan Adat

Gambar 2 Diagram Cartesius Dampak Pengelolaan Hutan Adat di HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti

Bahruzin (2014) melaporkan bahwa kegiatan PHBM dari segi aspek ekologi menggunakan *Importance Performance Analysis* (IPA) diperoleh pada Kuadran II, yaitu memiliki tingkat ketersediaan dan kepentingan yang tinggi sehingga indikator penting dan ketersediaannya sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian ini diinterpretasi dari kuadran-kuadran dalam diagram *cartesius* dan penyebab indikator ekologi tergambar dalam kuadran-kuadran pada diagram *cartesius* sebagai berikut :

### 1. Kuadran I (K.I)

Kuadran ini merupakan kuadran “prioritas utama”. Kuadran ini memuat indikator yang dianggap penting oleh responden, tetapi kinerja dampak pengelolaan hutan belum sesuai dengan harapan. Dengan interpretasi yakni tingkat kinerja dari pengelolaan hutan lebih rendah daripada tingkat harapan. Hal ini menyebabkan dampak pengelolaan hutan adat belum berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan responden.

Dari hasil diagram *cartesius*, sub indikator yang termasuk dalam kuadran ini yaitu indikator 1, 2 dan 3 pada HA Rio Peniti, berkaitan dengan sub indikator keadaan udara, air dikawasan hutan adat dan keanekaragaman hayati serta keragaman satwa di hutan adat. Menurut hasil wawancara dengan sekretaris Desa Lubuk Bedorong, kualitas udara, air dan keanekaragaman hayati serta keragaman satwa di sekitar kawasan HA Rio Peniti sedikit terganggu karena maraknya penambangan tanpa izin (PETI) disekitar kawasan hutan adat, sehingga memberikan dampak buruk bagi kawasan hutan adat berupa menurunnya kualitas udara dan air serta mengganggu keanekaragaman hayati dan satwa di hutan adat. Indikator ini didorong ke Kuadran II, dengan cara melakukan ajakan dan penyuluhan dari kelompok hutan adat dan dinas kehutanan, agar masyarakat tidak melakukan aktivitas PETI yang membuat pencemaran udara dan air serta mengganggu keanekaragaman hayati dan keragaman satwa di kawasan hutan adat.

## 2. Kuadran II (K.II)

Kuadran ini merupakan kuadran “Pertahankan Prestasi”. Kuadran II menampilkan indikator kinerja yang sangat baik, sesuai dengan harapan responden. Dari hasil diagram *cartesius*, pada HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti, semua sub indikator dampak pengelolaan hutan adat yang masuk dalam kuadran ini. Hal ini menandakan bahwa HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti telah melakukan pengelolaan hutan adat yang baik pada sub indikator keadaan udara, air, keanekaragaman hayati dan keragaman satwa serta kondisi tegakan hutan di kawasan hutan adat, dan juga terhadap dampak resiko banjir dan longsor di kawasan hutan. Dengan indikator dampak pengelolaan hutan adat yang berada pada penilaian “pertahankan prestasi”, maka indikator ini hanya perlu dipertahankan kinerjanya. Dengan kinerja yang terjaga baik, maka akan menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Untuk HA Rio Peniti masuk dalam kuadran 2 yaitu sub indikator kondisi tegakan hutan di hutan adat, dampak resiko banjir dan longsor di kawasan hutan adat. Hal ini menunjukan bahwa sub indikator 4 dan 5 sudah baik dalam kinerja sehingga memberikan kepuasan bagi responden membuat sesuai dengan harapan para responden. Dari wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Bedorong dan ketua kelompok hutan adat, tegakan hutan adat selalu terjaga dan kondisi tegakan pohon masih baik serta untuk banjir dan longsor di sekitar hutan adat tidak terjadi bencana sehingga aman jauh dari bencana banjir dan tanah longsor. Dari kuadran 2 ini sub indikator tegakan hutan dan resiko banjir longsor perlu dipertahankan kinerja sehingga masyarakat selalu puas dan tetap memberikan dampak pengelolaan hutan adat bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Dampak Ekologi pengelolaan hutan adat pada tingkat pengelolaan berbeda berdasarkan persepsi anggota kelompok dan masyarakat, pada HA Rio Peniti (KUPS kelas biru) dan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) memiliki persepsi tinggi terhadap indikator ekologi terlihat memiliki kesesuaian antara nilai kepuasan dengan nilai kepentingan

tinggi. Namun, kesesuaian nilai kepuasan dengan nilai kepentingan HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) lebih tinggi dibanding HA Rio Peniti (KUPS kelas biru) yaitu 96,4% untuk HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) dan 95% untuk HA Rio Peniti (KUPS kelas biru). Hasil dari analisis diagram cartesius, HA Imbo Larangan Pematang Kulim Inum Sakti (KUPS kelas emas) masuk dalam kategori sudah baik yaitu kuadran 2 (Pertahankan Prestasi) untuk semua 5 sub indikator ekologi sedangkan HA Rio Peniti (KUPS kelas biru) ada beberapa sub indikator masuk dalam kuadran 2 yaitu sub indikator kondisi tegakan hutan di hutan adat, dampak resiko banjir dan longsor di kawasan hutan adat, namun sub indikator keadaan udara, air di kawasan hutan adat dan keanekaragaman hayati serta keragaman satwa di hutan adat masuk dalam kuadran 1 (Prioritas Utama).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto dan Suharsimi. (2006). Metodologi penelitian. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2011). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bahruzin. (2014). Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Bandung Utara Jawa Barat. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Tesis.
- Lodhita, H.K. (2014). Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen menggunakan Metode IPA (Importance Performance Analysis) Dan CSI (Customer Satisfaction Index) Studi Kasus Pada Toko Oen, Malang. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. Skripsi.
- Martapani, A.N., Fauzi, H., Naparin, M. (2021). Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat. Studi Kasus : Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi. Jurnal Rimba Lestari Vol. 01, No. 01, Mei 2021 (35-46).
- Meng, S.W., Hideki, N., Philip, G. (2011). The Use of Importance-Performance Analysis (IPA) in Evaluating Japan's E-Government Services. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. 6: 17-30.
- Muherda, K.M. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Pada Perubahan Tutupan Lahan dan Ekonomi Masyarakat Desa Lempur. Universitas Jambi. Jambi. Tesis.
- Purnomo, W & Riandadari, D. (2015). Analisa Kepuasan Pelanggan terhadap Bengkel Dengan Metode IPA (Importance Performance Analysis) Di PT. Arina Parama Jaya Gresik. JTM- Volume 03 Tahun 2015, 54-63.